



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6414-6422

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pelatihan Keterampilan dan Kesempatan Kerja terhadap Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas di Surabaya

Fachrudy Asjari^{1✉}, Yuniar Fintari Gatrassia Suwarno², Dias Rahmawati³,

Silvi Anita Almunawaroh⁴, Yunita Dewi Lestari⁵

Manajemen

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email: fachrudy@unipa.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Surabaya. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan sangat penting untuk memperkuat kemampuan pasar tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan pustaka untuk mengkaji berbagai penelitian, laporan, dan kebijakan mengenai kualifikasi disabilitas dan integrasi tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan pustaka untuk mengkaji berbagai penelitian, laporan, dan kebijakan mengenai kualifikasi disabilitas dan integrasi tenaga kerja. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas berdampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, peluang kerja inklusif baik di sektor formal maupun informal merupakan elemen penting dalam mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi. Studi ini menyoroti pentingnya pemerintah, lembaga pelatihan, dan sektor swasta bekerja sama untuk membangun ekosistem kerja yang inklusif dan mendukung kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas

Kata kunci: *Kemandirian Ekonomi, Penyandang Disabilitas, Pelatihan Keterampilan, Surabaya*

Abstract

This research aims to analyze the role of skills training and employment opportunities in increasing the economic independence of people with disabilities in Surabaya. People with disabilities often face difficulties in accessing decent work. Therefore, improving skills is very important to strengthen labor

market capabilities. This research uses literature review techniques to examine various studies, reports and policies regarding disability qualifications and workforce integration. This research uses literature review techniques to examine various studies, reports and policies regarding disability qualifications and workforce integration. Research shows that training that suits the needs and potential of people with disabilities has a significant impact on their economic independence. In addition, inclusive employment opportunities in both the formal and informal sectors are an important element in encouraging the active participation of people with disabilities in economic activities. This study highlights the importance of government, training institutions and the private sector working together to build an inclusive work ecosystem and support economic independence for people with disabilities.

Keywords: *Economic Independence, People With Disabilities, Skills Training, Surabaya*

PENDAHULUAN

Pada jaman sekarang kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan sudah banyak digantikan dengan robot dan AI. Perusahaan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya pokok yang dikeluarkan saat produksi. Namun hal tersebut tidak akan mengubah fakta bahwa sumber daya manusia merupakan unsur penting bagi sebuah perusahaan yang sering kali dijadikan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan dan kegagalan dalam perusahaan (Wibowo et al., 2022).

Setiap SDM memiliki hak untuk bekerja, akan tetapi banyak perusahaan yang merekrut karyawan dilihat dari fisik dan Pendidikan yang kesekian. Bagaimana dengan penyandang disabilitas yang memiliki hak serupa untuk diberikan kesempatan kerja. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada masa pendidikan dasar hingga menengah, namun juga setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas yaitu mencari pekerjaan. Walaupun secara formal akses pendidikan yang non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusi, tantangan tetap ada. Aturan ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan bersama siswa umum berdasarkan kemampuan mereka. Pendidikan inklusif diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Namun, seiring terbukanya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, mereka juga menghadapi peluang dan tantangan yang lebih besar setelah lulus SMA. Bagi penyandang disabilitas muda, menghadapi stigma sosial merupakan bagian dari keseharian mereka.

Mereka sering kali menjadi sasaran komentar sarkastik seperti "Dilahirkan sebagai beban, sampai kematian tetap jadi beban," yang mencerminkan anggapan bahwa mereka ditakdirkan untuk selalu bergantung pada orang lain karena kondisi fisik atau psikologis

mereka. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya dan sulit untuk memimpikan hidup mandiri. Oleh karena itu, penyandang disabilitas sering diasosiasikan dengan ketergantungan dan pengangguran sepanjang hidup. Padahal, banyak penyandang disabilitas muda yang berusaha hidup mandiri, bekerja, dan membesarkan keluarga seperti orang lain. Meskipun lapangan pekerjaan terbatas, semangat kerja dan mentalitas yang kuat merupakan faktor penting yang membantu mereka menjadi individu yang mandiri.

Perekonomian suatu daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan unit terkecil dari perekonomian daerah, yaitu keluarga, sangat menentukan ketahanan ekonomi secara keseluruhan. (et al., 2024) 82% penyandang disabilitas di dunia tinggal di negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai aspek, termasuk ketenagakerjaan, kesehatan, dan informasi. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memilikiketerbatasa fisik. Padahal, bekerja adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap individu produktif, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu memiliki hak asasi yang bersifat universal, termasuk hak untuk hidup mandiri, mendapatkan pendidikan, serta berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi.

Namun, penyandang disabilitas, khususnya perempuan, sering kali mengalami diskriminasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kebanyakan perempuan penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, dan mereka menghadapi diskriminasi dalam perekrutan, promosi, pelatihan, serta kesempatan mengakses kredit dan sarana produksi lainnya. (et al., 2024) mengatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas sering kali mendapatkan upah yang lebih rendah dan jarang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Di seluruh dunia, perempuan penyandang disabilitas cenderung jarang mendapat kesempatan dalam pelatihan vokasional dan mengalami kesulitan mengakses program rehabilitasi. Bahkan setelah mengikuti pelatihan, kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan tetap sangat kecil. Pandangan umum masyarakat dan penasihat rehabilitasi cenderung menganggap perempuan penyandang disabilitas sebagai individu yang pasif dan tidak tertarik untuk bekerja. Di negara-negara maju sekalipun, program-program bantuan bagi penyandang disabilitas, seperti asuransi disabilitas dan kompensasi pekerja, jarang menguntungkan perempuan.

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, dengan populasi sebanyak 2,87 juta jiwa. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2020, terdapat 9.852 penyandang disabilitas di kota ini, menjadikannya wilayah perkotaan dengan

jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Jawa Timur. Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk menghilangkan diskriminasi dan menciptakan kesetaraan. Namun, penyandang disabilitas masih sering menghadapi diskriminasi dalam lingkungan keluarga, yang dapat menghalangi akses sosial dan memperkuat perasaan rendah diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah narrative literature review. Metode ini melibatkan penelusuran dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang telah diterbitkan, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Literatur review sendiri, menurut Snyder (2019), merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan merangkum hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, serta mengkritisi pandangan dari para ahli yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan gambaran umum tentang penelitian yang sudah dilakukan, tetapi juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan kontribusi yang dapat diberikan oleh studi tersebut.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari berbagai hasil penelitian yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal online. Peneliti melakukan pencarian dan seleksi jurnal dengan menggunakan mesin pencari seperti Google Scholar. Untuk memudahkan proses pencarian, peneliti menerapkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti: "disabilitas", "kesempatan kerja", "penyandang disabilitas", "keterampilan disabilitas", serta "ekonomi disabilitas". Kata kunci-kata kunci tersebut dipilih untuk memastikan bahwa jurnal-jurnal yang diakses dan dikaji memiliki relevansi yang tinggi dengan fokus penelitian, yaitu mengenai kesempatan kerja dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, peneliti melakukan tinjauan literatur secara komprehensif untuk mengidentifikasi dan menyajikan hasil-hasil penelitian terkini, baik dari perspektif teoretis maupun dari temuan-temuan praktis. Dalam tinjauan literatur ini, peneliti juga menyertakan studi kasus dari berbagai wilayah, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pelatihan dan kesempatan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah

Pemerintah Surabaya, melalui dinas tenaga kerja dan program sosial, memiliki peran penting dalam menyediakan pelatihan, namun lebih banyak insentif diperlukan agar perusahaan lebih termotivasi untuk merekrut penyandang disabilitas.

1. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Inklusif

Pemerintah berperan baik di tingkat nasional maupun regional dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan. Di Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas No.8 Tahun 2016 mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan kesempatan kerja yang setara kepada penyandang disabilitas, termasuk kuota 2% di sektor publik dan 1% di sektor swasta. Pemerintah daerah, seperti Surabaya, dapat memantau dan memfasilitasi penerapan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, sehingga memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang kerja.

2. Penyediaan Program Pelatihan Keterampilan

Pemerintah harus mendukung penerapan program keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam bentuk pelatihan teknis maupun pelatihan kejuruan dan kewirausahaan. Program ini dapat dilaksanakan melalui pusat ketenagakerjaan dan layanan sosial, bekerja sama dengan lembaga pelatihan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Di era digital, pengetahuan tentang teknologi sangatlah penting. Pemerintah dapat meluncurkan program pelatihan teknis bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan komputer, pemasaran digital, dan keterampilan teknologi informasi lainnya, untuk memperluas akses terhadap pekerjaan modern.

3. Mendorong Inklusi di Tempat Kerja

Pemerintah dapat mendorong perusahaan swasta untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan manfaat dan insentif pajak kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan menyediakan akomodasi yang sesuai Aksesibilitas fisik di tempat kerja dan adaptasi kerja dengan kebutuhan pekerja penyandang disabilitas. Pemerintah dapat memperkenalkan sertifikasi khusus bagi perusahaan yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, sehingga meningkatkan reputasi mereka dan berpotensi menjadi contoh bagi perusahaan lain.

4. Fasilitasi Akses Modal untuk Wirausaha

Pemerintah dapat menyediakan program pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan hibah untuk penyandang disabilitas yang ingin memulai usaha sendiri. Melalui

program kredit usaha rakyat (KUR) atau skema pendanaan lainnya, penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal. Selain akses modal, pemerintah dapat menyediakan program pendampingan atau inkubasi usaha, di mana penyandang disabilitas diberi bimbingan dalam mengelola bisnis mereka. Hal ini meliputi pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk.

5. Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Aksesibilitas

Pemerintah daerah berperan dalam memastikan tersedianya infrastruktur publik yang ramah disabilitas, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Fasilitas aksesibilitas ini akan mempermudah mobilitas penyandang disabilitas, baik dalam mengakses tempat kerja maupun fasilitas pelatihan. Pemerintah dapat memberikan panduan bagi perusahaan tentang penyesuaian fisik dan fasilitas di tempat kerja, termasuk akses ramp, lift, dan teknologi bantu seperti perangkat lunak khusus untuk penyandang disabilitas.

6. Peningkatan Kesadaran dan Penghapusan Stigma

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi dan hak-hak penyandang disabilitas. Kampanye inklusi sosial melalui media massa, sekolah, dan tempat kerja dapat membantu mengurangi stigma yang dihadapi penyandang disabilitas dan meningkatkan penerimaan mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah dapat mendorong program pendidikan inklusif di sekolah dan universitas yang mengajarkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk bersaing di pasar kerja.

7. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan

Pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Melalui kemitraan ini, program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan kesempatan kerja dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas. Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama internasional untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah sukses dalam memberdayakan penyandang disabilitas, misalnya dengan mengadopsi teknologi atau metode pelatihan yang inovatif.

8. Monitoring dan Evaluasi Program

Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan dengan baik, serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan kesempatan kerja yang ada. Pemerintah dapat melakukan pengumpulan data

secara berkala mengenai kondisi penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan. Data ini akan berguna untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

B. Kualitas dan Relevansi Pelatihan

Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas harus bersifat relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan memperhatikan kemampuan spesifik yang mereka miliki. Pelatihan yang berorientasi pada keterampilan praktis serta teknologi modern cenderung lebih efektif dalam mempersiapkan penyandang disabilitas untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Di Surabaya, beberapa program pelatihan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan perusahaan swasta menunjukkan hasil yang positif, tetapi masih terbatas pada sektor tertentu.

C. Aksesibilitas terhadap Peluang Kerja

Kendati terdapat berbagai program pelatihan, akses terhadap pekerjaan formal masih menjadi tantangan utama bagi penyandang disabilitas. Banyak literatur menekankan bahwa meskipun ada regulasi, perusahaan-perusahaan di Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan praktik inklusi di tempat kerja. Sebagian besar perusahaan formal belum memiliki infrastruktur atau kebijakan yang mendukung pekerja dengan disabilitas. Di sisi lain, sektor informal dan kewirausahaan menawarkan fleksibilitas lebih besar dan menjadi alternatif penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi.

D. Pengaruh Sosial dan Budaya

Stigma sosial masih menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Banyak penyandang disabilitas yang meskipun memiliki keterampilan dan pelatihan, masih mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Literasi publik mengenai pentingnya inklusi kerja perlu terus ditingkatkan, tidak hanya di kalangan pengusaha tetapi juga masyarakat luas, untuk menghapus hambatan budaya ini.

SIMPULAN

Kualifikasi ini membekali penyandang disabilitas dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mereka perlukan untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Pelatihan yang tepat dan berkualitas akan memberikan Anda keunggulan kompetitif di dunia kerja. Selain pelatihan, akses terhadap kesempatan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan inklusi sangat dibutuhkan. Melalui kombinasi pelatihan yang efektif dan akses terhadap pekerjaan, penyandang disabilitas

dapat mencapai kemandirian ekonomi. Kemandirian finansial ini tercermin dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Literatur juga menunjukkan bahwa hambatan struktural seperti stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas terus menimbulkan tantangan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananian, S., & Dellaferrera, G. (2024). A study on the employment and wage outcomes of people with disabilities. In *A study on the employment and wage outcomes of people with disabilities*. <https://doi.org/10.54394/yrcn8597>
- Britania, D. A., & Widiyarta, A. (2023). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Hak Pekerjaan yang Layak oleh UKM Tiara Handicraft Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3), 250.
- Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan: Kajian literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 2.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional bagi Penyandang Disabilitas di Surabaya.
- Kemenakertrans. (2020). *Laporan Tahunan Tentang Program Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*.
- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2), 5.
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala dan solusi bagi penyandang disabilitas kota semarang dalam mengakses pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 327.
- Nanda, A. S., & Fitryani, F. (2023, October). *Membangun Potensi Kemandirian Ekonomi Santri Pada Pondok Pesantren Mambaul Ulum Mojokerto*. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) (Vol. 3, No. 1, pp. 64-76)*.
- O'Reilly, A. (2013). *Hak atas pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas*. ILO. 22-23.
- Permana, A., & Yusuf, F. (2020). Peningkatan Inklusi Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas. Prosiding Seminar Nasional Inklusi Sosial, 2020.
- Prastowo, F. R., Pudyastuti, I., & Dewantara, B. R. (2018). Haruskah Aku Bekerja? Studi Fenomenologi Keputusan Bekerja pada Pemuda Penyandang Disabilitas di Empat Wilayah di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(1), 34-35.

- Rizky, U. F. (2014). Identifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas pasca sekolah menengah atas. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 52.
- Setiawan, H., & Pratiwi, L. (2020). Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 122-130.
- Suriasumantri, J. S. (2010). *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tambunan, T. (2009). *Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taqwarahmah, C. G., Riyono, B., & Setiyawati, D. (2017). Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 38.
- Wulandari, R., & Rahayu, S. (2020). Tantangan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Indonesia: Studi Kasus di Surabaya. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(1), 45-58.